
Optimalisasi Pengembangan Ekonomi Maritim di Provinsi Sulawesi Tenggara

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Al Razak Universitas Haluoleo alrazak746@gmail.com Eliyanti Agus Mokodompit Universitas Halu Oleo eamokodompit66@gmail.com	ISSN: 3046-8507 Vol. 1, No. 3, November 2024 http://almufi.com/index.php/ASH
© 2024 Almufi All rights reserved	

Saran Penulisan Referensi:

Razak, A., & Mokodompit E. A. (2024). Optimalisasi Pengembangan Ekonomi Maritim di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora*, 1 (3), 377-382.

Abstrak

Indonesia sebagai negara kepulauan menghadapi tantangan berat dalam mencapai efisiensi sistem logistik maritim. Indonesia menduduki peringkat ke-46 untuk kinerja logistik di dunia atau nomor 4 di Asia Tenggara, menyusul Singapura (7), Thailand (32), dan Malaysia (41), menurut World Bank (2018). Hal tersebut menggambarkan bahwa permasalahan logistik masih menjadi kendala dalam meningkatkan daya saing dan memperlancar arus distribusi komoditas antar wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja pelabuhan lokal dan dampak logistik maritim terhadap perekonomian pulau-pulau kecil provinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan memanfaatkan metode studi deskriptif disertai analisis data-data yang relevan. Pemilihan objek studi secara *purposive* pada wilayah yang memiliki potensi ekonomi maritim yang cukup besar. Hasil penelitian diperoleh bahwa terdapat berbagai kebijakan yang diidentifikasi dalam mendukung pengembangan ekonomi maritim di Provinsi Sulawesi Tenggara antara lain: kebijakan di bidang pengembangan ekonomi daerah, kebijakan di bidang perhubungan, kebijakan di bidang perikanan, kebijakan di bidang pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif, kebijakan pembangunan di bidang pembangunan infrastruktur kewilayahan. Berbagai strategi yang dapat ditempuh dalam optimalisasi pengembangan ekonomi maritim di Sulawesi Tenggara berdasarkan potensi dan peluang yang dimiliki sehingga menjadikan kelautan (kemaritiman) sebagai leading sector dalam pembangunan ekonomi daerah.

Kata kunci: Ekonomi Maritim, Perencanaan, Pengembangan

Abstract

Indonesia as an archipelagic country faces serious challenges in achieving maritime logistics system efficiency. Indonesia is ranked 46th for logistics performance in the world or number 4 in Southeast Asia, following Singapore (7), Thailand (32), and Malaysia (41), according to the World Bank (2018). This illustrates that logistics problems are still an obstacle in increasing competitiveness and facilitating the flow of commodity distribution between regions. This study aims to measure the performance of local ports and the impact of maritime logistics on the economy of the small islands of Southeast Sulawesi province. This study was conducted in Southeast Sulawesi Province using a descriptive study method accompanied by analysis of relevant data. The selection of study objects was purposive in areas that have quite large maritime economic potential. The results of the study showed that there were various policies identified in supporting the development of the maritime economy in Southeast Sulawesi Province, including: policies in the field of regional economic development, policies in the field of transportation, policies in the field of fisheries, policies in the field of tourism and creative economy development, development policies in the field of regional infrastructure development. Various strategies that can be taken in optimizing the development of the maritime economy in Southeast Sulawesi based on the potential and opportunities that exist so as to make maritime affairs a leading sector in regional economic development.

Keywords: Maritime Economy, Planning, Development

A. Pendahuluan

Logistik maritim saat ini menjadi perhatian para pemangku kepentingan di bidang logistik. Evolusi logistik maritim sebagai disiplin baru telah menghasilkan perubahan besar, dari peningkatan pengiriman dan permintaan pelanggan yang berkembang biak dan perubahan peran pelabuhan dalam konteks rantai pasokan dan logistik. Fungsi pelabuhan telah berkembang dari proses tradisional memfasilitasi kegiatan bongkar muat menjadi mata rantai dalam rantai logistik yang lebih masif sebagai bagian dari saluran distribusi global. Salah satu pengembangan kinerja dan kualitas layanan logistik maritim adalah peningkatan efisiensi pelabuhan, seperti pengendalian biaya transportasi laut (Panayides & Song, 2013).

Pelabuhan merupakan tempat penampungan kapal niaga, dilengkapi dengan infrastruktur dan pelayanan terpadu untuk memuat kargo dan memindahkannya dari laut ke darat dan udara begitu tiba di pelabuhan (Roa, Peña, Amante, & Goretti, 2013). Banyak negara di dunia yang berlomba-lomba menduduki peringkat ekonomi strategis di bidang transportasi laut, khususnya di pelabuhan, karena pelabuhan merupakan titik penghubung pertemuan laut dan darat (Roa, Peña, Amante, & Goretti, 2013). Mereka terpengaruh oleh perubahan politik atau sosial global dan rentan terhadap peristiwa atau perkembangan terendah yang mungkin terjadi di dunia karena mereka adalah mesin ekonomi global pertama untuk semua negara (Hlali & Hammami, 2017).

Indonesia sebagai negara kepulauan menghadapi tantangan berat dalam mencapai efisiensi sistem logistik maritim. Indonesia menduduki peringkat ke-46 untuk kinerja logistik di dunia atau nomor 4 di Asia Tenggara, menyusul Singapura (7), Thailand (32), dan Malaysia (41), menurut World Bank (2018). Hal tersebut menggambarkan bahwa permasalahan logistik masih menjadi kendala dalam meningkatkan daya saing dan memperlancar arus distribusi komoditas antar wilayah. Rata-rata biaya logistik di Indonesia adalah 26,03% dari Produk Domestik Bruto (PDB), dimana biaya transportasi merupakan komponen terbesar, yaitu 12,04% dari PDB (Bank Dunia, 2013). Logistik yang tidak efisien mengubah kinerja perdagangan karena menimbulkan biaya yang mempengaruhi perkembangan ekonomi lokal. Biaya logistik yang tinggi terjadi akibat tingginya biaya transaksi di pelabuhan peti kemas (Cho, 2014). Pengembangan pelabuhan, seperti pembenahan pengelolaan pelabuhan dan penguatan konektivitas antara transportasi darat dan transportasi laut dengan rantai pasok, terutama terkait dengan ekonomi lokal, sangat penting dalam mencapai efisiensi pelabuhan (Song & van Geenhuizen, 2014). Penelitian lain menyatakan bahwa peningkatan efisiensi pelabuhan dari 25% menjadi 75% dapat mengurangi biaya transportasi sebesar 12% dan meningkatkan perdagangan bilateral sebesar 25% (Clark, Dollar, & Micco, 2004).

Efisiensi logistik maritim sangat penting bagi wilayah pulau untuk memperluas ekonomi lokal. Ada studi terbatas tentang masalah ini. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan mengambil Sulawesi Tenggara. Keberadaan pelabuhan berperan penting dalam memperlancar aktivitas arus barang di wilayah sekitarnya dan pulau-pulau pinggir dengan aksesibilitas yang buruk. Kemajuan efisiensi logistik maritim di kepulauan merupakan upaya untuk mewujudkan pemerataan pembangunan antar wilayah. Peneliti memandang bahwa belum optimalnya peran sektor kemaritiman di Sulawesi Tenggara ditengarai oleh beberapa faktor diantaranya potensi dan kekuatan ekonomi kemaritiman belum terdata dan terkonsolidasi dengan baik serta keterbatasan kapasitas daerah termasuk kelengkapan regulasi dalam memperkuat pengelolaan kemaritiman berdasarkan potensi lokal. Aspek perencanaan menjadi bagian penting yang dibutuhkan dalam pengembangan ekonomi maritim untuk memastikan posisi Sulawesi Tenggara sebagai wilayah kemaritiman yang potensial. Kekayaan sumber daya maritim tersebut setidaknya mampu ditransformasi menjadi sumber kesejahteraan masyarakat dan menjadi *newleading sector* perekonomian daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja pelabuhan lokal dan dampak logistik maritim terhadap perekonomian pulau-pulau kecil provinsi Sulawesi Tenggara. Struktur makalah ini disusun sebagai berikut: bagian dua menyoroti logistik maritim pada pembangunan ekonomi dan kerangka model perbatasan stokastik. Bagian tiga menyajikan data dan model operasional yang terdiri dari variabel input dan output serta ruang lingkup pekerjaan. Bagian selanjutnya adalah analisis hasil dan pembahasan. Kesimpulan dan implikasi kebijakan untuk mengembangkan efisiensi logistik maritim, khususnya di pulau-pulau, diuraikan di bagian akhir makalah ini.

B. Metodologi

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan memanfaatkan metode studi deskriptif disertai analisis data-data yang relevan. Pemilihan objek studi secara *purposive* pada wilayah yang memiliki potensi ekonomi maritim yang cukup besar. Metode perolehan data menggunakan teknik dokumentasi, wawancara dan Focus Group Discussion (FGD). Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan SWOT analisis yang disertai dengan deskripsi dan pemaknaan terhadap data yang diperoleh (Daryanto,2010)

C. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan data yang didapatkan, maka dapat disusun strategi pengembangan ekonomi maritim di Provinsi Sulawesi Tenggara melalui metode analisis SWOT sebagai berikut.

Tabel 1. Strategi Pengembangan Ekonomi Maritim di Provinsi Sulawesi Tenggara

<p>Eksternal</p> <p>Internal</p>	<p>Opportunity (O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Regulasi percepatan pembangunan 2. Posisi geografis yang strategis 3. Pengembangan Energi Terbarukan 4. Berlakunya pasar bebas di era MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) 5. Meningkatnya permintaan produk dan jasa kelautan 	<p>Treatth (T)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencemaran dan Degradasi lingkungan 2. Bencana alam dan <i>climate change</i> 3. Ketergantungan terhadap kondisi alam 4. Meningkatnya daya saing daerah di luar Sulawesi Tenggara dan negara tetangga 5. Konflik kepentingan
<p>Strengtht (S)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kekayaan potensi sumber daya kelautan yang besar 2. Dukungan legislasi dan regulasi kelautan dan perikanan 3. Kesiapan lembaga pendukung yang memadai dan kompeten, seperti pemerintah, penyuluh, perguruan tinggi, dll. 4. Superioritas wilayah 	<p>S-O</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya kelautan secara efektif dan efisien • Pengembangan kapasitas kelembagaan maritim dan kemitraan • Peningkatan peran lembaga pendukung yang memadai 	<p>S-T</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan intervensi dalam menghadapi <i>climate change</i> dan mitigasi bencana • Hukum dan aturan tata kelola laut • Pemetaan laut dan Pembentukan kawasan ekonomi maritim

Weakness (W)	W-O	W-T
<ol style="list-style-type: none"> 1. Keunggulan wilayah sebagian besar masih bersifat komparatif. 2. Belum ada kesepakatan penetapan kawasan 3. Terbatasnya tenaga yang terampil 4. Terbatasnya infrastruktur kelautan termasuk bangunan pelabuhan, industri kelautan, pemasaran dan pariwisata, listrik, komunikasi, sentra kegiatan perikanan, jalan, dll. 5. Rendahnya minat investor menanamkan modalnya di bidang kelautan. 6. Lemahnya koordinasi lintas sektor. 7. Terbatasnya pengawasan dan penegakan hukum 8. Ketersediaan data informasi dan akses pasar 	<ul style="list-style-type: none"> • Pencitraan keunggulan wilayah • Pengembangan Infrastruktur dan konektivitas maritim Basis Data 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan budaya maritim • Meningkatkan KISS (Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi terutama regulasi ekonomi perikanan antar sektor maupun antar pusat dan daerah

Diskusi

Berdasarkan hasil yang didapatkan, maka dapat dibuat berbagai kebijakan yang diidentifikasi dalam mendukung pengembangan ekonomi maritim di Provinsi Sulawesi Tenggara antara lain:

1. Kebijakan di bidang Pengembangan Ekonomi Daerah melalui peningkatan ekonomi masyarakat berbasis komoditas dan pengembangan investasi daerah. Peningkatan ekonomi masyarakat berbasis komoditas diantaranya:
 - a. Peningkatan peran Bank Perkreditan Rakyat (BPR) BAHTERAMAS akan ditingkatkan menjadi salah satu lembaga keuangan untuk mendukung proses peningkatan nilai tambah melalui proses industrialisasi.
 - b. Pembangunan klaster industri pedesaan akan dibangun dalam bentuk klaster usaha. Berkaitan dengan itu maka kebijakan pengembangan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur akan dilaksanakan secara terintegrasi pada pusat-pusat klaster sehingga dapat memberikan dampak yang lebih luas dan merata di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.
 - c. Peningkatan daya saing komoditas melalui upaya menjaga keberlanjutan produksi dan penggunaan teknologi serta peningkatan nilai tambah yang dikerjakan oleh masyarakat desa.

Pengembangan Investasi Daerah, diantaranya:

 - a. Menetapkan tata ruang wilayah yang meliputi penetapan pusat-pusat kegiatan berdasarkan struktur ruang, pengaturan pola ruang dan penetapan kawasan strategis.
 - b. Mengembangkan kawasan strategis yang meliputi : kawasan industri pertambangan di Konawe Utara, Konawe Selatan, Bombana, Kolaka, Kolaka Utara dan Buton; kawasan pertanian tanaman pangan di Wawotobi Kabupaten Konawe; kawasan industri perkebunan, kawasan industri kelautan dan perikanan, kawasan ekonomi terpadu di Teluk Kendari; kawasan industri semen dan kawasan pariwisata di Wakatobi.
 - c. Pengembangan kawasan strategis akan disinergikan dengan pembangunan ekonomi masyarakat, terutama terkait dengan kegiatan yang terjadi akibat multiplier effect dari pengembangan kawasan-kawasan tersebut.
2. Kebijakan di Bidang Perikanan
 - a. Optimalisasi hasil produksi perikanan tangkap serta revitalisasi dan pembangunan pelabuhan perikanan melalui pengembangan kawasan industri perikanan terpadu, motorisasi, peningkatan jumlah armada dan alat tangkap, serta peningkatan kapasitas kelembagaan nelayan
 - b. Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar berbasis komoditi unggulan melalui ekstensifikasi, rehabilitasi dan revitalisasi lahan budidaya serta peningkatan kapasitas kelembagaan pembudidaya ikan

- c. Pengembangan Unit Perbenihan Rakyat (UPR) dan balai benih perikanan melalui penyediaan induk unggul, peningkatan dan rehabilitasi sarana prasarana, penerapan sertifikasi perbenihan serta penguatan kelembagaan UPR
 - d. Peningkatan mutu hasil perikanan melalui penanganan pasca panen dan pengolahan hasil perikanan
 - e. Pengembangan industri pengolahan hasil perikanan melalui penetapan industri perikanan terpadu dan pengembangan infrastruktur
 - f. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan melalui pelatihan, magang dan penguatan kelembagaan
 - g. Pengelolaan konservasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan melalui pengembangan rencana strategis pesisir dan pulau-pulau kecil dan penetapan kawasan konservasi laut daerah
 - h. Pendayagunaan pulau-pulau kecil melalui pembangunan dan pengembangan infrastruktur dasar pulau-pulau kecil
 - i. Pengembangan sistem pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui peningkatan kapasitas aparatur, peningkatan partisipasi pengawasan masyarakat, operasi pengawasan secara regular dan terpadu, serta peningkatan sarana prasarana pengawasan
 - j. Peningkatan pelayanan administrasi dan publik melalui optimalisasi sumber daya yang tersedia
 - k. Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan dan akuntabilitas kinerja melalui capaian laporan kinerja dan keuangan serta pengembangan perencanaan
 - l. Mendorong kemampuan perempuan dalam pengambilan keputusan melalui peningkatan kapasitas perempuan
3. Kebijakan di Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- a. Melakukan tata kelola administrasi dan manajemen dengan dukungan sumber daya yang tersedia
 - b. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia parekras melalui pelatihan, pembekalan, standarisasi dan sertifikasi usaha dan profesi
 - c. Peningkatan promosi budaya, pariwisata dan ekonomi kreatif melalui pemasaran yang kreatif dan efektif
 - d. Peningkatan kreativitas karya seni pertunjukan
 - e. Mengembangkan potensi pariwisata melalui pengembangan destinasi wisata.
 - f. Berkembangnya potensi dan kreatifitas masyarakat untuk mengembangkan ekonomi pariwisata
4. Kebijakan di bidang Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan dan Kawasan Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan.
- Kebijakan ini ditetapkan berdasarkan prioritas pengembangan sektor-sektor produksi seperti pusat-pusat pemukiman masyarakat, sentra-sentra produksi pertanian, kawasan-kawasan tumbuh cepat, outlet komoditas dan lain-lain. Kebijakan tersebut diantaranya:
- a. Pembangunan sarana prasarana transportasi terpadu di tingkat wilayah
 - b. Pembangunan sarana prasarana telekomunikasi dan telecentre, untuk pelayanan pemerintahan dan perekonomian
 - c. Pembangunan sumber daya air
 - d. Pembangunan sarana prasarana sanitasi dan air minum
 - e. Pembangunan energi alternatif, dengan memanfaatkan tenaga air, surya, angin dan panas bumi
 - f. Pembangunan sarana prasarana desa dan kecamatan
 - g. Pembangunan sarana prasarana kawasan strategis. Pada periode Tahun 2008-2013 telah dirancang beberapa kawasan strategis yang potensial untuk meningkatkan nilai tambah secara signifikan yaitu kawasan pertambangan Asera, Wiwirano dan Langgikima (AWILA), kawasan pertambangan Kolaka Utara, Kawasan Pertambangan Watekule Kabaena Bombana, Kawasan Industri Kaka di Ladongi Kolaka, Kawasan Industri Rumput Laut di Baubau dan Buton serta kawasan Industri Pariwisata di Wakatobi. Kawasan-kawasan ini diharapkan mampu menjadi pemicu terhadap pembangunan masyarakat dan daerah sekitar melalui proses peningkatan nilai tambah.
5. Kebijakan di Bidang Perhubungan
- a. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran

- b. Mengembangkan sarana prasarana transportasi darat melalui pengembangan fasilitas angkutan jalan dan angkutan penyeberangan
- c. Mengembangkan sarana prasarana transportasi laut melalui pengembangan fasilitas angkutan laut
- d. Mengembangkan infrastruktur pada kawasan strategis melalui pengembangan infrastruktur secara terpadu pada kawasan strategis
- e. Mengintegrasikan pelayanan administrasi perizinan perhubungan kedalam PTSP melalui debirokratisasi dan koordinasi pelayanan sistem

Mengembangkan regulasi standar pelayanan melalui penetapan standar pelayanan angkutan, meningkatkan disiplin pelayanan pada fasilitas angkutan.

D. Kesimpulan

Kebijakan di bidang Pengembangan Ekonomi Daerah melalui peningkatan ekonomi masyarakat berbasis komoditas dan pengembangan investasi daerah. Pembangunan klaster industri pedesaan akan dibangun dalam bentuk klaster usaha. Berkaitan dengan itu maka kebijakan pengembangan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur akan dilaksanakan secara terintegrasi pada pusat- pusat klaster sehingga dapat memberikan dampak yang lebih luas dan merata di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Infrastruktur Kewilayahan dan Kawasan Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan. Kebijakan ini ditetapkan berdasarkan prioritas pengem- bangan sektor-sektor produksi seperti pusat-pusat pemukiman masyarakat, sentra-sentra produksi pertanian, kawasan-kawasan tumbuh cepat, outlet komoditas dan lain-lain.

E. Referensi

- Abdoui, M., & Hammami, S. (2017). The Impact of FDI Inflows and Environmental Quality on Economic Growth: an Empirical Study for the MENA Countries. *Journal of the Knowledge Economy*, 8(1), 254–278. <https://doi.org/10.1007/s13132-015-0323>
- Amin, C., Mulyati, H., Anggraini, E., & Kusumastanto, T. (2021). Impact of maritime logistics on archipelagic economic development in eastern Indonesia. *The Asian Journal of Shipping and Logistics*, 37(2), 157-164. (<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2092521221000043>)
- Fabinyi, M., Belton, B., Dressler, W. H., Knudsen, M., Adhuri, D. S., Aziz, A. A., ... & Vandergeest, P. (2022). Coastal transitions: Small-scale fisheries, livelihoods, and maritime zone developments in Southeast Asia. *Journal of Rural Studies*, 91, 184-194.
- Panayides, P. M., & Song, D. W. (2013). Maritime logistics as an emerging discipline. *Maritime Policy & Management*, 40 (3), 295-308. (<https://doi.org/10.1080/03088839.2013.782942>)
- Soepriyadi, I., (2021). Dukungan Terhadap Pengembangan Industri Logistik Kargo Atau Barang Udara. *Mediastima*, 27(2), pp.110-139.
- World Bank. (2018). Global Financial Development Report 2017/2018: Bankers without Borders. Washington, DC: World Bank. doi:10.1596/978-1-4648-1148-7. License: Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO
- Yu, Z., & Di, Q. (2020). The coordination between maritime economies and marine carrying capacity and their spatiotemporal evolution in the cities of the bohai rim in china. *Ecological Modelling*, 438, 109192.